



## Kota Jogja...

Ia menjelaskan terdapat sejumlah tantangan dan kerawanan dalam Pemilu Serentak 2019 yang diklasifikasikan dalam variabel dan indikator yang memengaruhinya.

*Pertama*, variabel kamtibmas dengan indikator konflik pendukung, isu SARA, hoaks, dan konflik batas wilayah. *Kedua*, variabel Daftar Pemilih Tetap (DPT) dengan indikator pemilih ganda dan perekaman KTP elektronik.

*Ketiga*, variabel netralitas aparatur sipil negara (ASN) dengan indikator mobilitas ASN dan penggunaan fasilitas negara. *Keempat*, variabel penyelenggara pemilu dengan indikator netralitas penyelenggara pemilu dan penyelenggara pemilu yang terkena sanksi.

*Kelima*, variabel bantuan dan dukungan, dengan indikator distribusi logistik, penertiban alat peraga kampanye dan pengamanan TPS.

Thahjo menambahkan bagian terpenting dari proses pemilu adalah peran dan partisipasi masyarakat. Tingkat partisipasi politik masyarakat juga menjadi perhatian khusus pada Pemilu Serentak 2019.

Menurut dia, saat ini terjadi fenomena fluktuasi tingkat partisipasi politik masyarakat dalam pemilu. Ini terlihat dari beberapa hasil pelaksanaan pemilu legislatif sebelumnya yaitu pada 2004 tingkat partisipasi masyarakatnya 84%, 2009 tingkat partisipasi 71% dan 2014 sebesar 74%.

Untuk Pemilu 2019, KPU mencanangkan tingkat partisipasi masyarakat 78%. Politikus PDIP itu berharap target tersebut dapat

terpenuhi dengan baik dan bahkan melampaui yang telah dicanangkan.

Adapun, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto mengatakan Pemilu Serentak 2019 merupakan momentum untuk memilih pemimpin yang amanah.

Ia mengingatkan siapa saja yang mengganggu pesta demokrasi berarti mengkhianati bangsa.

"Ini merupakan momentum, momentum itu yang baik jangan kita jadikan tidak baik. Di sini kita memilih pemimpin, harus secara aman kemudian tertib dan sukses. Jangan coba-coba mengganggu pemilu, siapapun dia dengan cara apapun, karena yang mengganggu pemilu itu mengkhianati bangsa," kata dia.

### Bentrokan

Tercatat beberapa bentrokan terkait dengan kampanye politik terjadi di Jogja. Pada Rabu (27/2), kegiatan kampanye capres nomor urut 02, Prabowo Subianto di Jogja diwarnai keributan di luar gedung. Diduga ada penyusup yang memprovokasi massa pro Prabowo di kawasan Jalan Magelang Km 4,5, Sleman.

Pada Januari, tepatnya pada Minggu (28/1), juga terjadi keributan seusai acara *Deklarasi Jogja Dukung Jokowi*. Kepolisian di wilayah DIY sudah menyiapkan personel untuk mengantisipasi kerawanan pemilu. Kapolresta Jogja, Kombespol Armaini mengungkapkan seluruh kekuatan personel Polresta Jogja dan ditopang oleh personel Polda DIY dan Brimob DIY disiagakan untuk menjaga Pemilu 2019 aman dari bentrok

antarsimpatisan. "Sudah kami siapkan," katanya.

Adapun, Kabagops Polres Kulonprogo, Kompol Sudarmawan mengatakan Polres sudah memetakan ada 21 TPS yang masuk kategori rawan. Ia mengatakan 21 TPS tersebut masuk pada Kecamatan Galur, Temon, Wates, Samigaluh, Kalibawang dan Girimulyo. "Tiap TPS memiliki jenis kerawanan berbeda, ada yang rawan karena faktor geografis, sejarah konflik pemilu di masa lalu dan banyaknya jumlah caleg di satu kawasan itu," ujar Sudarmawan.

Kasubbag Dalops Polres Sleman Iptu Joko Susilo mengatakan semua wilayah Sleman rawan saat pemilu. Itu berdasarkan pengalaman dari kasus masa lalu. "Pada masa tenang 14, 15, 16 April, kami siapkan 365 personel, pada waktu pemungutan suara, kami siapkan 1.217 personel," jelas dia.

Polres Sleman juga sudah memetakan TPS yang rawan terjadi konflik pada saat pemungutan suara. "Dari total 3.391 TPS di Sleman, ada 12 TPS yang masuk kategori rawan. 3.377 TPS kategori aman, dan ada dua TPS khusus di Lapas Cebongan dan Pakem," ujar dia.

Ke-12 TPS kategori rawan tersebut, kata dia, berada di Babarsari. Hal tersebut dikarenakan daerah Babarsari banyak pendatang dengan latar belakang yang berbeda-beda, sehingga perlu diantisipasi ketika mereka memaksakan kehendak akhirnya lepas dari aturan. (Yogi Anugrah, Fahmi Ahmad Burhan & Uli Febriarni/Detik/Antara)



| Instansi                          | Nilai Berita | Sifat | Tindak Lanjut   |
|-----------------------------------|--------------|-------|-----------------|
| 1. Sekretariat Komisi Pemilihan U | Netral       | Biasa | Untuk Diketahui |
| 2. Sekretariat Panwaslu (Bawaslu) |              |       |                 |
| 3. Sat Pol PP                     |              |       |                 |

Yogyakarta, 30 Juni 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005